

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Permasalahan Ketimpangan gender telah menjadi masalah yang melanda dunia internasional. Kekerasan berbasis gender di Pakistan adalah anggota keluarga atau pasangan, dengan adanya pemicu kekerasan berbasis gender adalah sosial budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi kekerasan berbasis gender termasuk memberlakukan undang-undang dan meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal HAM dan CEDAW namun, situasi di masyarakat Pakistan terus meningkat dalam kasus. Kehadiran UN Women sebagai organisasi internasional berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender untuk membantu pemerintah Pakistan mengatasi kekerasan berbasis gender di negaranya.

Berdasarkan *Norm emergence* Pakistan dan UN Women dalam upaya melaksanakan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, seperti Pemerintahan di Pakistan, aktor lain dan sektor swasta serta melakukan kampanye, program dan konvensi internasional. Peran UN Women sebagai instrument, Pakistan menggunakan UN Women sebagai alat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. UN Women bersama Pemerintah Pakistan dalam kerjasamanya telah mengikuti ketentuan CEDAW serta mengeluarkan undang-undang untuk perempuan, dan melakukan penandatanganan MoU mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women juga mengadakan kampanye dan program sebagai upayanya di Pakistan.

Kampanye tersebut antara lain Kampanye 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender (GBV) dan Kampanye StopJahezkhor. UN Women juga mengadakan program yaitu Program Essential Service Package (ESP). Melalui program tersebut, UN Women berperan sebagai instrument dalam membantu Pemerintah Pakistan yang mempunyai kekurangan dalam mengatasi akses pelayanan sosial bagi perempuan dan anak perempuan yang mengalami tindak kekerasan.

Berdasarkan *Norm Cascade* UN Women Pakistan memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pengembangan dan implementasi percontohan gender dan perdamaian di Pakistan. Tujuan operasional program ini adalah untuk menanggapi kebutuhan mendesak perempuan dan anak perempuan dalam keadaan darurat dan untuk memberikan dukungan teknis. Pemerintah Pakistan telah menyuarakan komitmennya terhadap kerangka kerja yang memandang perempuan dan pemuda sebagai landasan pembangunan perdamaian. Dalam Kebijakan Keamanan Nasional pertamanya (2022-2026), Pemerintah Pakistan mengakui sebagai pilar utama dan bertujuan untuk memastikan integrasi kesetaraan gender ke dalam narasi keamanan nasional melalui partisipasi penuh dan bermakna dari perempuan dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum, sektor peradilan, dan pemeliharaan perdamaian. Pakistan juga tetap menjadi salah satu kontributor terbesar ke-6 untuk pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk tim keterlibatan wanita dan kontribusi pasukan.

Berdasarkan *Norm internalisasi* Dari langkah-langkah UN Women dalam menyebarkan nilai dan norma kesetaraan gender di Pakistan, ini telah dilakukan

dalam bentuk pengimplementasikan undang-undang dan kebijakan oleh pemerintah Pakistan. Ini merupakan bentuk internalisasi norma yang dilakukan UN Women di dalam Pakistan. Dengan berbagai RUU seperti anti pemerkosaan, aktivis perempuan dalam penistaan agama, kekerasan dalam rumah tangga, pertentangan Pakistan soal perlindungan terhadap perempuan, dan hukum dan undang-undang yang mengatur tentang kesetaraan gender atau hak asasi perempuan.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa masih terdapatnya kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan Pemerintah Pakistan dalam mengatasi ketimpangan gender mendapatkan kesulitan, sehingga peneliti tertarik dalam melihat peran UN Women dalam memberikan bantuan tersebut. Namun penelitian ini hanya berfokus kepada menganalisis peran UN Women dalam mengatasi kesetaraan perempuan dalam pendidikan, ekonomi, politik. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan upaya-upaya yang telah dilakukan UN Women untuk kesetaraan gender terhadap perempuan di Pakistan. Karena fakta yang terjadi masih belum ada penurunan akan isu kekerasan gender di Pakistan.

Penulis menyarankan peneliti selanjutnya agar melakukan analisis hambatan di UN Women dalam konsep bantuan luar negeri di Pakistan. Penelitian terkait isu ketimpangan gender dalam perubahan sektor berbagai bidang dalam membantu peneliti yang dilakukan kaum perempuan dalam mengancam aspek kehidupan. Namun pada penelitian yang penulis lakukan ini, masih sangat kurang dalam

membahas isu perubahan sektor berbagai bidang seperti ekonomi dan fasilitas kaum perempuan. Maka dari itu, peneliti selanjutnya penulis menyarankan peneliti lainnya dapat melakukan analisis terkait upaya negara Asia Selatan dalam mengatasi ketimpangan gender.

